BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu serta proyeksi kerangka pendanaan periode yang akan datang berdasarkan dari hasil analisis kebijakan keuangan masa lalu.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam ulu dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Salah satu indikator lain untuk mengetahui baik buruknya kinerja

keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Indikator DDF dihitung melalui perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total Pendapatan dalam APBD seperti pada Tabel 3.1 berikut. DDF digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan keuangan yang bersumber dari PAD.

Tabel 3.1
Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kab. Mahakam Ulu

Tahun	Realisasi PAD (Rupiah)	Realisasi Total Pendapatan	DDF (%)	Keterangan Rasio
2016	8.709.661.135	1.115.741.541.082	1,68%	Sangat Rendah
2017	12.098.668.690	963.796.428.019	1,26%	Sangat Rendah
2018	17.405.627.520	1.217.740.110.761	1,43%	Sangat Rendah
2019	18.514.855.998	1.491.737.599.990	1,24%	Sangat Rendah
2020	18.309.278.410	1.228.604.336.761	1,49%	Sangat Rendah
2021	33.164.866.575	1.163.877.641.918	2,85%	Sangat Rendah
2022	16.457.803.277	1.543.581.871.533	1,07%	Sangat Rendah
RATA-RATA	17.808.680.229	1.246.439.932.866	1,57%	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kab. Mahakam Ulu yang diolah

Nilai DDF Kabupaten Mahakam Ulu periode 2016-2022 dalam kategori sangat rendah dengan rata-rata sebesar 1,57%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Mahakam Ulu belum bisa mandiri dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan daerah. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil untuk membiayai pembangunan daerah dan realisasi PAD selama 2016-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Di tahun 2022 PAD mengalami penurunan hamper 50% dibandingkan 2021. Pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan serta bantuan dari provinsi. Hal ini akan menyebabkan berbagai kemungkinan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Apabila dana Transfer dari Pusat atau dari Provinsi mengalami penurunan/perlambatan, maka

bisa sangat dipastikan kegiatan-kegiatan di pemerintahan juga akan mengalami perlambatan bahkan penundaan ataupun pembatalan.

3.1.1.Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Gambar 3.1
Tren Perolehan PAD 2016-2022

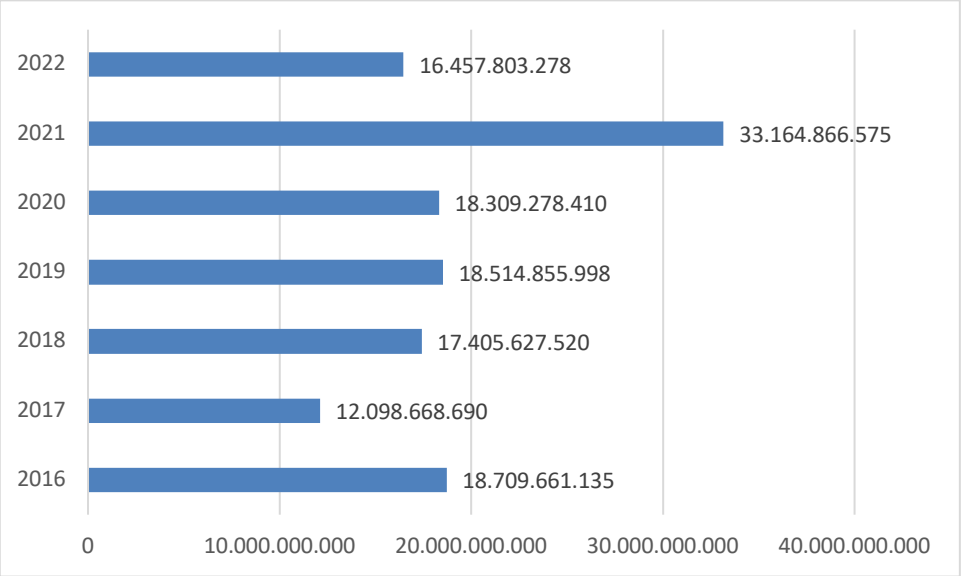

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Kab. Mahakam Ulu yang diolah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mahakam Ulu periode 2016-2022 masih bersifat fluktuatif. Penurunan yang tajam terjadi pada periode 2021-2022 dari Rp33,1 milyar menjadi hanya Rp16,5 milyar. Penurunan PAD yang cukup tajam juga pernah terjadi pada periode 2016-2017.

Dalam hal pendapatan daerah, nilai pendapatan daerah selama 2016-2022 juga terlihat berfluktuasi. Pada periode 2021-2022 pendapatan daerah menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari Rp1.163 milyar menjadi Rp1.543 milyar atau naik sebesar 32,67%. Bila

dikaitkan dengan belanja daerah, pada periode 2021-2022 belanja daerah menunjukkan penurunan dari Rp1.217 milyar menjadi Rp1.169 milyar. Kenaikan pendapatan belanja daerah yang diikuti oleh penurunan belanja selama 2021-2022 berdampak pada surplus APBD yang cukup besar pada tahun 2022.

Gambar 3.2
Grafik Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Periode 2016-2022

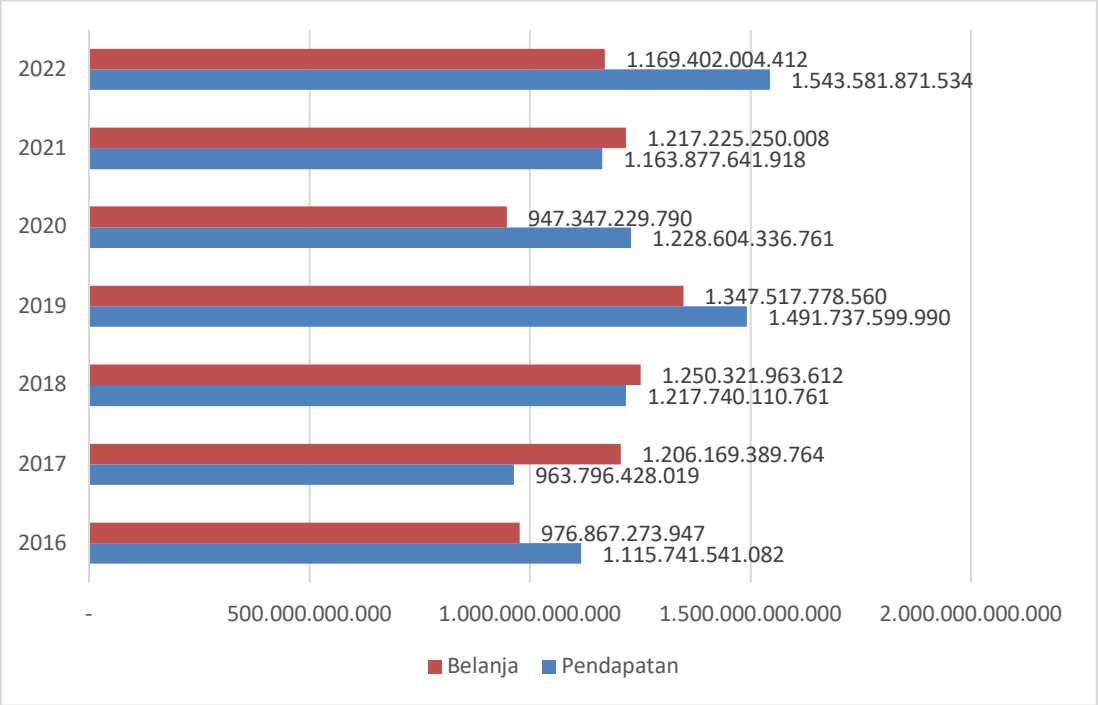

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab. Mahakam Ulu yang diolah.

Selama periode 2016-2022 rata-rata pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.246.439.932.866 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,56%. Proporsi pendapatan daerah rata-rata masih di dominasi oleh pendapatan transfer yaitu sebesar 95,60% sedangkan sisanya sebesar 2,82% dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah dan 1,57% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu rata-rata belanja daerah adalah Rp1.159.264.412.870 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,04%. Proporsi terbesar pada belanja daerah adalah untuk belanja operasional dengan rata-rata proporsi selama 2016-2022 sebesar 62,19%

dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,24%. Untuk belanja modal, rata-rata proporsi selama 2016-2022 adalah sebesar 26,64% dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar -1,95%. Komponen belanja operasional terbesar adalah belanja barang dan jasa dengan rata-rata per tahun selama 2016-2022 sebesar Rp530.596.755.188 dan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,34%.

Selama 2016-2022 defisit APBD terjadi di tahun 2017, 2018, dan 2021 yang pembiayaannya dilakukan melalui Silpa. Rata-rata pembiayaan per tahun selama 2016-2022 adalah Rp123.728.276.289 dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan per tahun selama periode tersebut yaitu sebesar -0,38%. Besarnya Silpa tahun 2020 dan 2022 disebabkan karena adanya efisiensi dari belanja daerah terutama dari belanja operasional, yaitu factor belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Informasi APBD Kabupaten Mahakam Ulu periode 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Daerah	1.115.741.541.082	963.796.428.019	1.217.740.110.761	1.491.737.599.990	1.228.604.336.761	1.163.877.641.918	1.543.581.871.534	1.246.439.932.866	5,56
Pendapatan Asli Daerah	18.709.661.135	12.098.668.690	17.405.627.520	18.514.855.998	18.309.278.410	33.164.866.575	16.457.803.278	19.237.251.658	-2,11
Hasil Pajak Daerah	625.318.821	458.899.337	870.645.300	2.954.210.690	5.474.654.378	12.352.498.182	2.303.478.194	3.577.100.700	24,27
Hasil Retribusi Daerah	666.666.242	578.258.700	663.492.800	1.166.240.870	1.060.224.960	1.431.243.628	1.092.553.000	951.240.029	8,58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	3.066.166	353.998.938	201.293.388	215.939.538	278.732.980	210.606.202	208,78
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.417.676.072	11.061.510.653	15.868.423.254	14.040.405.500	11.573.105.684	19.165.185.227	12.783.039.104	14.558.477.928	-5,03
Pendapatan Transfer	1.065.219.536.347	891.350.077.918	1.144.372.046.641	1.395.253.601.792	1.210.267.191.951	1.121.092.861.343	1.527.124.068.256	1.193.525.626.321	6,19
Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat	503.268.623.500	558.420.838.291	552.099.879.947	591.784.827.374	524.109.924.202	994.563.066.572	1.392.963.173.258	731.030.047.592	18,49
Dana Alokasi Umum	479.139.794.000	470.722.849.000	470.722.849.000	497.410.048.000	451.971.660.000	443.010.427.000	442.586.663.455	465.080.612.922	-1,31
Dana Alokasi Khusus	23.634.942.000	87.697.989.291	76.368.544.292	94.374.779.374	59.377.181.202			68.290.687.232	-100,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	493.887.500	-	5.008.486.655	-	12.761.083.000			6.087.819.052	-100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	561.950.912.847	332.929.239.627	592.272.166.694	803.468.774.418	686.157.267.749	126.529.794.771	134.160.894.998	462.495.578.729	-21,24
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.812.343.600	60.347.681.411	55.962.436.600	77.969.142.200	27.866.400	9.619.914.000	-	33.677.054.887	-21,27
Pendapatan Lain-Lain	31.812.343.600	60.347.681.411	55.962.436.600	77.969.142.200	27.866.400	9.619.914.000	-	33.677.054.887	-21,27
Belanja Daerah	976.867.273.947	1.206.169.389.764	1.250.321.963.612	1.347.517.778.560	947.347.229.790	1.217.225.250.008	1.169.402.004.412	1.159.264.412.870	3,04
Belanja Operasional	626.681.555.424	754.280.007.243	828.055.780.052	863.779.938.438	574.079.025.155	643.137.526.899	758.757.952.883	721.253.112.299	3,24
Belanja Pegawai	151.441.217.025	169.371.046.842	147.755.858.235	155.096.446.993	161.551.746.598	167.647.932.451	214.057.911.252	166.703.165.628	5,94
Belanja Barang dan Jasa	449.208.878.788	569.465.037.541	667.043.848.190	687.465.500.325	367.187.771.437	457.636.094.064	516.170.155.969	530.596.755.188	2,34
Belanja Subsidi	3.679.017.000	1.546.299.000	687.378.000	1.492.013.120	1.492.013.120	0	0	1.270.960.034	-20,20
Belanja Hibah	10.716.000.000	3.604.727.500	5.035.127.327	14.405.488.000	39.764.572.000	13.742.498.384	25.982.887.328	16.178.757.220	15,91
Belanja Bantuan Sosial	11.636.442.611	10.292.896.360	7.533.568.300	5.320.490.000	4.082.922.000	4.111.002.000	2.546.998.334	6.503.474.229	-22,37
Belanja Modal	291.306.389.976	294.981.767.046	255.341.528.120	273.892.678.399	344.679.729.126	400.824.958.242	258.789.638.563	302.830.955.639	-1,95
Belanja Tidak Terduga	0	230.541.000	0	865.000.000	28.588.475.509	23.196.004.157	3.458.466.265	8.048.355.276	71,88
Belanja Transfer	58.879.328.547	156.677.074.475	166.924.655.440	208.980.161.723	-	150.066.760.710	148.395.946.701	148.320.654.599	16,66
SURPLUS/DEFISIT	138.874.267.135	-242.372.961.744	-32.581.852.851	144.219.821.430	281.257.106.971	-53.347.608.090	374.179.867.122	87.175.519.996	17,96
Pembiayaan Daerah	137.401.808.201	284.209.309.609	66.233.397.825	53.409.134.565	216.128.972.495	80.998.686.491	27.716.624.834	123.728.276.289	-23,42
Penerimaan Pembiayaan Daerah	137.401.808.201	289.209.309.609	66.233.397.825	53.409.134.565	216.128.972.495	83.848.686.491	27.716.624.834	124.849.704.860	-23,42
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	5.000.000.000	-	-		2.850.000.000	-	2.616.666.667	n.a.
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	276.276.075.336	41.836.347.864	33.651.544.975	197.628.955.995	497.386.079.467	27.651.078.401	401.896.491.955	210.903.796.285	6,45

Sumber: LKPJ Kabupaten Mahakam Ulu yang diolah.

3.1.2.Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Selama periode 2015-2021 total asset pemerintah daerah naik sebesar 110,97% dari Rp1.197 milyar menjadi Rp2.526 milyar. Rata-rata pertumbuhan total asset per tahun sebesar 13,25%. Komponen asset tetap dari 2015 ke 2021 naik sebesar 64,92% sedangkan asset lainnya nak sebesar 675,14%. Dari sisi Kewajiban, terlihat kewajiban jangka pendek dari 2015 ke 2021 bertambah 42,79% sementara ekuitas bertambah sebesar 81,04%.

Tabel 3.3
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2015-2021 (Rp)

AKUN	2015	2021	Kenaikan 2016-2021 (%)	Rata-rata Pertumbuhan per Tahun (%)
TOTAL ASET	**1.197.192.407.142,26**	**2.525.764.617.978**	110,97	13,25
ASET LANCAR	**192.530.782.534,03**	**122.012.426.971**	-36,63	-7,32
Kas dan Setara Kas	137.404.585.769,29	29.227.672.070	-78,73	-22,74
Investasi Jangka Pendek				
Piutang Pendapatan	-	9.028.190.787,29		
Piutang Lainnya	7.854.975.321,74		-100,00	-100,00
Penyisihan Piutang				
Beban dibayar Dimuka		5.689.443.574,21		
Persediaan	47.271.221.443,00	204.059.124.852,03	331,68	27,60
Aset untuk Dikonsolidasikan				
Aset Lancar Lainnya				

INVESTASI JANGKA PANJANG	**3.305.012.959,22**	**5.589.443.622,50**	69,12	9,15
Investasi Nonpermanen	3.305.012.959,22	589.443.622,50	-82,17	-24,97
Investasi Permanen	-	5.000.000.000,00		
ASET TETAP	**989.351.294.815,08**	**1.631.615.432.930,70**	64,92	8,70
Tanah	234.377.681.030,00	152.912.118.080,00	-34,76	-6,87
Peralatan dan Mesin	123.510.069.664,08	224.096.110.843,08	81,44	10,44
Gedung dan Bangunan	148.595.446.915,00	346.602.716.826,33	133,25	15,16
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	565.885.754.053,00	1.158.379.416.535,90	104,70	12,68
Aset Tetap Lainnya	2.501.439.614,00	4.920.890.623,00	96,72	11,94
Konstruksi dalam Pengerjaan	47.831.862.209,00	220.741.527.587,39	361,49	29,03
Akumulasi Penyusutan	-133.350.958.670,00	-476.037.347.565,00	256,98	23,63
DANA CADANGAN	**-**	**0**		
Dana Cadangan				
ASET LAINNYA	**12.005.316.833,93**	**93.057.768.476,28**	675,14	40,68
Tagihan Jangka Panjang	-			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud	1.551.190.616,67	13.644.892.129,17	779,64	43,68
Aset Lain-Lain	10.454.126.217,26	79.412.876.347,11	659,63	40,21
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.197.192.407.142,26**	2.165.414.266.326,96	80,87	10,38
KEWAJIBAN	**5.156.960.084,67**	**7.363.647.904,76**	42,79	6,12
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.156.960.084,67**	**7.363.647.904,76**	42,79	6,12
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	515.808,00	509.769.088,64	98729,23	215,61
Utang Bunga				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			
Pendapatan Diterima di Muka		19.946.174,50		
Utang Belanja		3.447.042.343,28		
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.156.444.276,67	3.386.890.298,34	-34,32	-6,77
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**0**		
Utang Dalam Negeri	-			
Utang Jangka Panjang Lainnya				
EKUITAS	**1.192.035.447.057,59**	**2.158.050.618.422,20**	81,04	10,40
EKUITAS	**1.192.035.447.057,59**	**2.158.050.618.422,20**	81,04	10,40
Ekuitas	1.192.035.447.057,59	2.158.050.618.422,20	81,04	10,40

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, diolah *(data yang ada merupakan data terbaru)*

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017-2021, dapat di lihat pada tabel sebagai

berikut.

Tabel 3.4
Analisis Neraca Kabupaten Mahakam Ulu

No	Jenis Analisis	Hasil analisis					Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	**Rasio Liquiditas**						
	a. Rasio Lancar	3,25	13,64	59,09	36,04	0,50	8,85
	b. Rasio Quick	1,50	4,61	31,38	11,04	0,19	5,43
2	**Rasio Solvabilitas**						
	a. Rasiio Total Hutang Terhadap Aset	0,0328	0,0095	0,0034	0,0043	0,096	0,0191
	b. Rasio hutang terhadap modal	0,0339	0,0096	0,0008	0,0043	0,11	0,0105

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

   Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, rasio lancar dari tahun 2015 sampai 2021 mengalami fluktuatif. Kondisi terparah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,50. Hal ini mengindikasi kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang jangka pendeknya melalui aset lancar hanya sebesar 0,50 kali. Rata-rata rasio lancer selama 2017-2021 adalah 8,85. Rasio lancar perlu dijaga jangan sampai menurun tiap tahunnya. Penurunan nilai rasio lancar dari tahun ke tahun memberi pertanda yang kurang baik dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

2. Rasio *Quick*

   Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, juga terjadi fluktuasi dengan rata-rata 5,43. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam membayar kewajiban jangka pendek cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan setiap tahunnya sehingga mencapai level diatas angka 10.

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

   Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset rata-rata sebesar 0,0191. Hal ini menunjukkan total aset pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu cukup baik karena masih dibawah angka 1.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal

   Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rata-rata rasio hutang terhadap modal sebesar 0,0105.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai disini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Proporsi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka persentasenya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Aparatur

No	Uraian	Total belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun 2016	151.441.217.025	976.867.273.946	15,50%
2	Tahun 2017	169.371.046.842	1.211.169.389.763	13,98%
3	Tahun 2018	147.755.858.235	1.250.321.963.611	11,82%
4	Tahun 2019	155.096.446.993	1.347.517.778.559	11,51%
5	Tahun 2020	161.551.746.598	947.347.229.790	17,05%
6	Tahun 2021	167.647.932.451	1.220.075.250.008	13,74%
7	Tahun 2022	214.057.911.252	1.169.402.004.412	18,30%

Sumber: Laporan Realisasi Belanja Kab. Mahakam Ulu, diolah.

Belanja pegawai setiap tahunnya mengalami fluktuatif cenderung meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan daerah. Akan tetapi proporsi belanja aparatur terbesar total pengeluaran masih kecil. Hal ini dikarenakan jumlah aparatur dilingkup pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu masih sedikit. Tahun 2022 rasio belanja aparatur mencapai 18,30% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang besarnya 13,74%. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan belanja kebutuhan aparatur namun di periode yang sama total

belanja daerah mengalami penurunan.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut:

- ***Akuntabilitas***, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan;
- ***Profesionalitas***, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah;
- ***Proporsionalitas***, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah;
- ***Transparansi***, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik;
- ***Pengawasan*** yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2024-2026

a. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024-2026

Perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada periode 2016-2022 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017, penerimaan Pendapatan Daerah sudah mengalami penurunan dari

Rp1.115.741.541.082 menjadi Rp963.796.428.019 di tahun 2018 atau turun sebesar 13,62%. Pendapatan daerah selama 2017-2019 menunjukkan kenaikan yang stabil namun pada periode 2019-2021 kembali menunjukkan penurunan. DI tahun 2022 kondisi pendapatan daerah Kembali mengalami kenaikan. Meskipun bersifat fluktuatif, garis tren linier penerimaan Kabupaten Mahakam Ulu masih menunjukkan peningkatan/bernilai positif.

Gambar 3.3
Perkembangan dan Tren Perkembangan Penerimaan Pendapatan Kabupaten Mahakam Ulu, 2016-2022

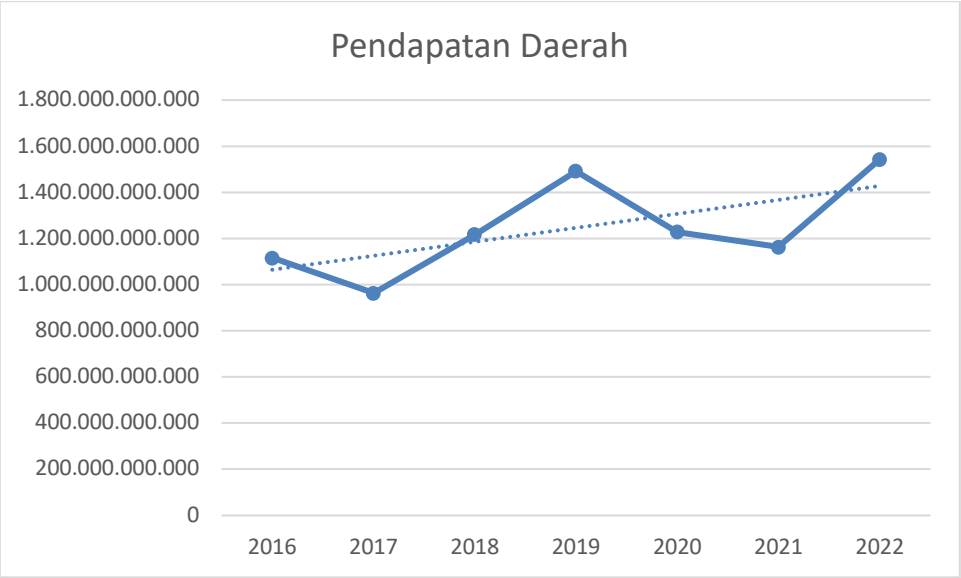

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2016-2022, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2021-2025, yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi

produksi dan pemasaran;

b. Meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara *online* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
c. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
e. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan optimalisasi aset daerah;
f. Revitalisasi produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan;
g. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah;
h. Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan;
i. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

Proses perumusan proyeksi pendapatan Kabupaten Mahakam Ulu 2024-2026 menggunakan asumsi:

- Pertumbuhan ekonomi naik meningkat setiap tahun dengan dengan dukungan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang meningkat sehingga berdampak pada dinamika perekonomian masyarakat serta mampu mendorong peningkatan PAD.
- Inflasi relatif stabil atau terkendali, tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan atau terjadi goncangan *(shock)* perekonomian.
- Program-program yang telah disusun pada periode sebelumnya dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien
- Situasi dan kondisi perekonomian nasional dan global stabil yang ditandai dengan semakin membaiknya harga komoditas sumber daya alam.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah selama Tahun 2024-2026 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2024-2026

KOMPONEN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Penetapan 2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	**1.163.877.641.918**	**1.543.581.871.534**	**1.503.111.016.669**	**1.578.250.000.000**	**1.650.020.000.000**	**1.802.267.000.000**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33.164.866.575	16.457.803.278	11.240.054.701	13.150.000.000	14.470.000.000	16.167.000.000
Pendapatan Transfer	1.121.092.861.343	1.527.124.068.256	1.487.281.777.968	1.560.000.000.000	1.630.000.000.000	1.780.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.619.914.000	0	4.586.184.000	5.100.000.000	5.550.000.000	6.100.000.000
BELANJA DAERAH	**1.217.225.250.008**	**1.169.402.004.412**	**1.775.489.020.904**	**1.547.500.000.000**	**1.602.200.000.000**	**1.662.940.000.000**
Belanja Operasional	643.137.526.899	758.757.952.883	985.830.291.249	878.300.000.000	900.700.000.000	926.060.000.000
Belanja Modal	400.824.958.242	258.789.638.563	640.442.992.380	522.000.000.000	556.000.000.000	593.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	23.196.004.157	3.458.466.265	6.193.574.675	6.200.000.000	6.500.000.000	6.880.000.000
Belanja Transfer	150.066.760.710	148.395.946.701	143.022.162.600	141.000.000.000	139.000.000.000	137.000.000.000
SURPLUS/DEFISIT	**-53.347.608.090**	**374.179.867.122**	**-272.378.004.235**	**30.750.000.000**	**47.820.000.000**	**139.327.000.000**

b. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Tahun 2024-2026

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan belanja daerah pada periode 2016-2022, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2024-2026 akan diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024-2026 terutama program-program yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD.
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Program Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM, BUMD, BUMKam, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga swadaya masyarakat desa di Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Melakukan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara.
4. Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM dan sektor-sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
   a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
   b. Melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program;
   c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
6. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:

a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas sebagai *seed money* yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai *urban manager*;
c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

Proyeksi dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistika dengan menggunakan beberapa pertimbangan alat perhitungan seperti rata-rata pertumbuhan, rata-rata hitung, serta deviasi standar, Hal ini didasarkan pada kondisi data historis yang berfluktuatif sehingga dalam beberapa kasus tidak memungkinkan penggunaan satu metode saja. Selain itu juga dilakukan proses penyesuaian (adjustment) dari hasil perhitungan akhir.

Berdasarkan kebijakan diatas disertai prediksi pendapatan yang sudah dihitung, maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024-2026 disusun seperti sebagai berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Periode 2024-2026

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Penetapan 2023	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH	1.217.225.250.008	1.169.402.004.412	1.775.489.020.904	**1.547.500.000.000**	**1.602.200.000.000**	**1.662.940.000.000**
Belanja Operasioanal	643.137.526.899	758.757.952.883	985.830.291.249	878.300.000.000	900.700.000.000	926.060.000.000
Belanja Pegawai	167.647.932.451	214.057.911.252	256.437.969.432	262.000.000.000	267.000.000.000	273.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa	457.636.094.064	516.170.155.969	694.467.075.809	582.000.000.000	595.000.000.000	609.000.000.000
Belanja Subsidi	0	0	1.595.908.200	1.600.000.000	1.700.000.000	1.760.000.000
Belanja Hibah	13.742.498.384	25.982.887.328	25.976.837.808	26.000.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	4.111.002.000	2.546.998.334	7.352.500.000	6.700.000.000	7.000.000.000	7.300.000.000
Belanja Modal	400.824.958.242	258.789.638.563	640.442.992.380	522.000.000.000	556.000.000.000	593.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	23.196.004.157	3.458.466.265	6.193.574.675	6.200.000.000	6.500.000.000	6.880.000.000
Belanja Transfer	150.066.760.710	148.395.946.701	143.022.162.600	141.000.000.000	139.000.000.000	137.000.000.000

Sumber: Data diolah, 2023

c. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, maka asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan perkiraan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan terutama SILPA akan bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik; dan
2) Pengeluaran pembiayaan utamanya penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari investasi atau penyertaan modal yang diperoleh.

Tabel 3.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah Periode 2024-2026

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Penetapan 2023	2024	2025	2026
Penerimaan Pembiayaan	83.848.686.491	27.716.624.834	277.378.004.235	144.000.000.000	151.200.000.000	158.760.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	2.850.000.000	-	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Pembiayaan Bersih	80.998.686.491	27.716.624.834	272.378.004.235	134.000.000.000	141.200.000.000	148.760.000.000

Sumber: Data diolah, 2023

3.3.2.Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penyusunan kebijakan kerangka keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Berdasarkan hasi perhitungan diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang belum dialokasikan kedalam belanja Prioritas I, II, dan III.

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2026

Uraian	2024	2025	2026
Pendapatan	1.578.250.000.000	1.650.020.000.000	1.802.267.000.000
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)			
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran			
Dikurangi:			
Belanja Wajib dan Mengikat	443.500.000.000	451.200.000.000	460.940.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Kapasitas Keuangan Daerah	**1.124.750.000.000**	**1.188.820.000.000**	**1.331.327.000.000**

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 3.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024-2026

Uraian	2024	2025	2026
Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	1.124.750.000.000	1.188.820.000.000	1.331.327.000.000
Proritas I	562.375.000.000	594.410.000.000	665.663.500.000
Prioritas II	393.662.500.000	416.087.000.000	465.964.450.000
Prioritas III	168.712.500.000	178.323.000.000	199.699.050.000
Total Belanja Prioritas	**1.124.750.000.000**	**1.188.820.000.000**	**1.331.327.000.000**

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 158, Prioritas I akan dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar seperti alokasi fungsi pendidikan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah belanja daerah, fungsi kesehatan sejumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah belanja daerah, fungsi pengawasan sejumlah 0,3% dari jumlah belanja daerah, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sejumlah 0,3% (nol koma tiga persen) dari jumlah belanja daerah. Prioritas II akan dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkat Prioritas III akan dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.